

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laut Natuna Utara merupakan kawasan strategis yang memiliki arti penting bagi Indonesia, baik dari sudut pandang geopolitik, ekonomi, maupun keamanan maritim. Wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai salah satu pintu masuk perdagangan internasional yang sibuk, tetapi juga mengandung potensi sumber daya alam yang sangat besar, termasuk minyak dan gas bumi. Selain itu, Laut Natuna Utara menjadi bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang diakui secara internasional berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 (Beckman, 2017). Namun, letaknya yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan membuat kawasan ini menjadi arena persaingan geopolitik yang intens, terutama akibat klaim sepihak Cina melalui konsep "*Nine-Dash Line*."

Cina telah lama mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, termasuk kawasan yang masuk dalam ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Meskipun Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) pada 2016 menyatakan bahwa klaim Cina tidak memiliki dasar hukum, kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai Cina terus memasuki wilayah ini, memicu insiden yang berulang antara kedua negara (Connelly, 2016). Situasi ini memaksa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memperkuat pengawasan dan pengamanan di Laut Natuna Utara. Dalam konteks domestik, Laut Natuna Utara juga menjadi ujian penting bagi

kebijakan keamanan maritim Indonesia. Pemerintah sebelumnya telah mencanangkan doktrin *global maritime fulcrum* sebagai visi strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, realisasi visi ini membutuhkan lebih dari sekadar retorika; diperlukan kebijakan yang terintegrasi antara aspek militer, diplomasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan keamanan maritim ini mengalami reorientasi, dengan fokus pada modernisasi pertahanan laut, peningkatan diplomasi maritim, dan penguatan infrastruktur strategis di Natuna (Cochrane, 2020).

Dalam merespons kompleksitas tantangan di Laut Natuna Utara, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum*) pada tahun 2014. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, yang menekankan lima pilar utama: pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya kelautan, pengembangan infrastruktur konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim (Kusumastanto, 2019). Implementasi kebijakan ini di Laut Natuna Utara diwujudkan melalui penguatan infrastruktur pertahanan, termasuk pembangunan pangkalan militer terintegrasi dan modernisasi sistem pengawasan maritim. Namun, Suryadinata (2021) mencatat bahwa meskipun kebijakan Poros Maritim Dunia telah memberikan kerangka strategis bagi penguatan maritim Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektoral yang belum optimal, dan peningkatan

ketegangan dengan Tiongkok di kawasan tersebut. Sebastian (2020) menambahkan bahwa kebijakan ini telah berkontribusi pada penguatan posisi Indonesia dalam forum-forum maritim internasional, namun masih memerlukan strategi yang lebih komprehensif untuk menghadapi dinamika keamanan maritim kontemporer.

Presiden Prabowo, dengan latar belakang militernya yang kuat, telah menekankan pentingnya modernisasi armada laut Indonesia sebagai langkah awal untuk menghadapi ancaman eksternal. Anggaran pertahanan difokuskan pada penguatan armada kapal perang dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran di perairan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah memperkuat kehadiran militer di Natuna dengan mendirikan pangkalan strategis dan menambah patroli laut secara berkala (Susanto, 2021). Namun, tantangan tidak hanya datang dari luar negeri. Secara domestik, Indonesia menghadapi keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi armada dan pengadaan teknologi baru. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait, seperti TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sering kali menjadi kendala dalam implementasi kebijakan keamanan maritim. Dalam hal ini, pendekatan Presiden Prabowo juga mencakup strategi untuk melibatkan masyarakat lokal di Natuna, baik melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis maritim maupun pendidikan mengenai pentingnya menjaga kedaulatan wilayah (Caballero-Anthony, 2019).

Diplomasi juga memainkan peran penting dalam kebijakan keamanan maritim Indonesia. Sebagai anggota aktif ASEAN, Indonesia mendorong penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan melalui pendekatan multilateral. Posisi

Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam sengketa teritorial memberikan keunggulan diplomatik untuk berperan sebagai penengah dalam negosiasi (Cochrane, 2020). Di sisi lain, Indonesia juga harus menjaga hubungan bilateral dengan Cina, mengingat pentingnya hubungan ekonomi antara kedua negara. Selain pendekatan militer dan diplomasi, reorientasi kebijakan ini juga mencerminkan pentingnya keberlanjutan ekonomi di wilayah Natuna. Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memberdayakan masyarakat lokal, termasuk pengembangan sektor perikanan dan pariwisata. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperkuat legitimasi klaim Indonesia atas wilayah tersebut (Susanto, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara mengalami reorientasi di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Dengan menyoroti integrasi strategi pertahanan, diplomasi, dan pemberdayaan ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi keamanan maritim serta menawarkan solusi terhadap tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia di kawasan strategis ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam latar belakang maka penulis menjabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana Reorientasi Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara pada Era Kepemimpinan Presiden Prabowo?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yakni sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara pada era kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan menyoroti strategi pertahanan nasional, kebijakan luar negeri, serta dampaknya terhadap kedaulatan dan stabilitas kawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami dinamika kebijakan maritim Indonesia di tengah tantangan geopolitik regional dan global.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a) Menganalisis reorientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara pada era kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan menyoroti integrasi strategi pertahanan nasional dan diplomasi maritim.
- b) Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim di Laut Natuna Utara, termasuk langkah strategis untuk menghadapi ancaman eksternal.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan kontribusi akademis dalam studi hubungan internasional, khususnya terkait kebijakan keamanan maritim Indonesia. Dengan menganalisis reorientasi kebijakan pada era kepemimpinan Presiden Prabowo, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam

memahami dinamika kebijakan maritim yang mengintegrasikan aspek pertahanan, diplomasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kajian akademis selanjutnya mengenai keamanan maritim, geopolitik regional, dan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Laut Natuna Utara.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam merumuskan langkah-langkah efektif untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim di Laut Natuna Utara. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu meningkatkan kolaborasi antara sektor militer, diplomasi, dan masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan eksternal seperti klaim sepihak Cina. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi institusi terkait untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat dan strategis di kawasan Asia Tenggara.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Literature Review

Laut Natuna Utara telah menjadi sorotan dalam kebijakan keamanan maritim Indonesia, terutama karena posisinya yang strategis di jalur pelayaran internasional dan potensi sumber daya alamnya yang melimpah. Sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, wilayah ini mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Namun, letaknya yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan membuat kawasan ini rentan terhadap ketegangan geopolitik, terutama karena klaim sepihak Cina melalui konsep "*Nine-Dash Line*." Beckman (2017)

menjelaskan bahwa Laut Natuna Utara sering menjadi tempat aktivitas ilegal kapal-kapal Cina yang memasuki wilayah ZEE Indonesia dengan dalih klaim historis, meskipun klaim ini telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) pada 2016.

Keberadaan Laut Natuna Utara yang strategis menjadikannya salah satu pusat perhatian dalam strategi keamanan maritim Indonesia. Connelly (2016) dalam penelitiannya menguraikan bagaimana Laut Natuna Utara bukan hanya aset ekonomi tetapi juga simbol kedaulatan Indonesia. Wilayah ini mengandung potensi cadangan gas alam yang signifikan, yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai proyek eksplorasi dan produksi. Namun, ancaman dari aktivitas kapal asing, seperti illegal fishing dan pelanggaran wilayah, terus menjadi masalah serius. Menurut laporan Badan Keamanan Laut (Bakamla), sekitar 1.000 kapal asing terdeteksi melakukan pelanggaran di Laut Natuna setiap tahun, dengan mayoritas berasal dari Cina dan Vietnam (Susanto, 2021).

Dalam konteks pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia, Anwar (2020) menganalisis kompleksitas proses formulasi kebijakan maritim nasional melalui studi mendalam terhadap interaksi antar lembaga. Penelitiannya menunjukkan bagaimana dinamika birokrasi antara TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Luar Negeri mempengaruhi implementasi kebijakan keamanan di Laut Natuna Utara. Temuan ini menegaskan pentingnya memahami peran dan kepentingan berbagai aktor domestik dalam pembentukan kebijakan maritim Indonesia.

Laksmiana (2019) memperdalam pemahaman ini dengan mengeksplorasi bagaimana Indonesia menyeimbangkan tuntutan domestik dan tekanan internasional dalam kebijakan maritimnya. Studinya mengungkapkan bahwa respons Indonesia terhadap pelanggaran wilayah di Laut Natuna Utara tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan, tetapi juga oleh kebutuhan untuk mempertahankan hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Analisis ini menunjukkan kompleksitas tawar-menawar antara kepentingan nasional dan stabilitas hubungan bilateral.

Wuryandari (2021) memberikan perspektif tambahan dengan menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Indonesia selama masa transisi kepemimpinan. Penelitiannya mengidentifikasi bagaimana karakteristik personal pemimpin dan orientasi strategis yang berbeda dapat menghasilkan pergeseran signifikan dalam pendekatan terhadap isu-isu maritim. Studi ini relevan dalam memahami potensi reorientasi kebijakan di bawah kepemimpinan baru, khususnya terkait pengelolaan keamanan di Laut Natuna Utara.

Diplomasi maritim menjadi salah satu pendekatan penting Indonesia dalam menghadapi tantangan di Laut Natuna Utara. Sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia telah berperan sebagai penengah dalam isu ini melalui mekanisme multilateral ASEAN. Caballero-Anthony (2019) menyebutkan bahwa Indonesia telah mendorong disusunnya Code of Conduct (CoC) untuk memastikan bahwa negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional. Namun, implementasi CoC masih menghadapi hambatan, terutama karena perbedaan

kepentingan antara negara-negara anggota ASEAN dan pengaruh besar Cina di kawasan.

Selain diplomasi, modernisasi militer juga menjadi elemen penting dalam kebijakan keamanan maritim Indonesia. Cochrane (2020) menyoroti bahwa pemerintah Indonesia telah meningkatkan anggaran pertahanan untuk memperkuat armada laut dan membangun pangkalan strategis di Natuna. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan militer tetapi juga untuk menunjukkan kehadiran negara di wilayah perbatasan yang sering menjadi sasaran pelanggaran. Sebagai contoh, peningkatan patroli oleh TNI Angkatan Laut dan Bakamla telah berhasil menekan aktivitas ilegal di kawasan tersebut. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini.

Keamanan maritim di Laut Natuna Utara tidak hanya melibatkan ancaman eksternal tetapi juga isu-isu internal yang memengaruhi masyarakat lokal. Susanto (2021) dalam penelitiannya menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal di Natuna sebagai bagian dari strategi keamanan yang lebih luas. Program-program seperti pengembangan sektor perikanan, pendidikan berbasis maritim, dan pelatihan keterampilan telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang dapat mendukung klaim kedaulatan Indonesia atas wilayah Natuna. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa manfaat dari program-program ini dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Dalam analisis lebih lanjut, Laut Natuna Utara juga menjadi contoh bagaimana dinamika domestik dan internasional saling berinteraksi dalam pembentukan kebijakan keamanan. Beckman (2017) mencatat bahwa konflik di Laut Cina Selatan, meskipun tidak secara langsung melibatkan Indonesia, memberikan tekanan besar terhadap kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mampu menavigasi hubungan bilateral dengan Cina, yang merupakan mitra dagang terbesar, sambil mempertahankan posisi tegas terhadap pelanggaran wilayah. Hal ini mencerminkan kompleksitas geopolitik yang dihadapi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan.

Selain itu, pentingnya kerja sama regional dalam menjaga keamanan maritim juga menjadi fokus berbagai penelitian. Caballero-Anthony (2019) menekankan bahwa sebagai anggota ASEAN, Indonesia memiliki peran kunci dalam memastikan stabilitas di Laut Cina Selatan. Kerja sama dalam bentuk latihan militer bersama, pertukaran informasi, dan penguatan mekanisme pengawasan kawasan telah dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas negara-negara di kawasan dalam menghadapi ancaman maritim. Namun, efektivitas kerja sama ini sering kali terhambat oleh perbedaan kepentingan dan prioritas antar negara anggota ASEAN.

Literatur yang ada menunjukkan evolusi signifikan dalam pendekatan Indonesia terhadap keamanan maritim dan kebijakan luar negeri, khususnya di Laut Natuna Utara. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana perubahan kepemimpinan nasional memengaruhi orientasi kebijakan maritim Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis reorientasi kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,

dengan fokus khusus pada integrasi antara kebijakan luar negeri dan strategi keamanan maritim. Untuk memahami lebih dalam dinamika kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks keamanan maritim, penting untuk menganalisis bagaimana proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Analisis kebijakan luar negeri memberikan kerangka teoretis yang membantu menjelaskan kompleksitas ini.

1.5.2. *Two Level Game Theory*

Two Level Game Theory yang dikembangkan oleh Robert D. Putnam menawarkan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas interaksi antara politik domestik dan negosiasi internasional dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Teori ini menjelaskan bagaimana para pemimpin nasional harus bermain di dua level permainan secara simultan: di level internasional (Level I) dengan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan mitra internasional, dan di level domestik (Level II) dengan melakukan tawar-menawar dengan berbagai kelompok kepentingan dalam negeri untuk memastikan ratifikasi dan implementasi kesepakatan tersebut (Putnam, 1988).

Dalam konteks kebijakan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara, *Two Level Game Theory* memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana pemerintah Indonesia harus menyeimbangkan tuntutan domestik untuk melindungi kedaulatan wilayah dengan kebutuhan menjaga hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Di Level I, Indonesia harus mempertimbangkan dinamika hubungan dengan Tiongkok sebagai mitra dagang utama dan kekuatan regional yang signifikan, serta memperhatikan ekspektasi dari negara-negara ASEAN lainnya

dalam pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan. Sementara di Level II, pemerintah harus merespons tekanan dari berbagai pemangku kepentingan domestik, termasuk militer, kelompok nelayan, dan masyarakat sipil yang menuntut perlindungan kedaulatan wilayah (Mo, 1994).

Moravcsik (1993) memperdalam analisis *Two Level Game* dengan menambahkan dimensi preferensi domestik dan strategi negosiasi internasional. Dalam kasus Laut Natuna Utara, hal ini tercermin dari bagaimana Indonesia harus mempertimbangkan preferensi berbagai aktor domestik - mulai dari TNI AL yang menginginkan penguatan pertahanan maritim, hingga kelompok bisnis yang berkepentingan dengan stabilitas hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Kompleksitas ini semakin dipertegas oleh Evans et al. (1993) yang menekankan pentingnya memahami bagaimana struktur institusional domestik dan internasional membentuk ruang gerak para pengambil keputusan dalam negosiasi dua level.

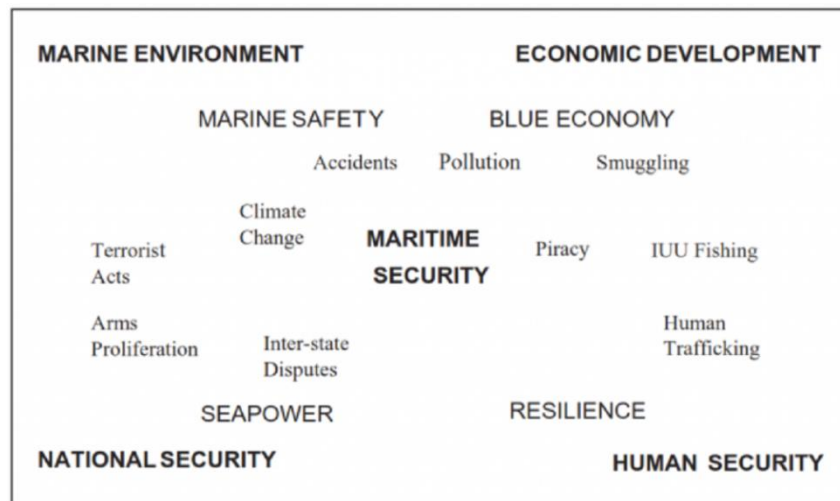
Signifikansi *Two Level Game Theory* dalam menganalisis kebijakan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara juga terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana *'win-sets'* - yaitu rangkaian kesepakatan yang dapat diterima di kedua level - terbentuk dan berubah seiring waktu. Putnam (1988) berargumen bahwa ukuran *win-sets* dipengaruhi oleh distribusi kekuatan dan preferensi di level domestik, institusi politik dalam negeri, dan strategi negosiator di level internasional. Pemahaman ini crucial untuk menganalisis bagaimana Indonesia menavigasi kompleksitas hubungan dengan Tiongkok sambil mempertahankan kredibilitas domestiknya dalam melindungi kepentingan nasional di Laut Natuna Utara.

1.5.3. Konsep Keamanan Maritim

Keamanan maritim merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas di Laut Natuna Utara. Perspektif ini mencakup berbagai elemen, seperti perlindungan wilayah laut, pengawasan perbatasan, penegakan hukum di perairan, dan pencegahan ancaman seperti *illegal fishing*, penyelundupan, serta pelanggaran wilayah oleh kapal asing. Cochrane (2020) menjelaskan bahwa keamanan maritim menjadi prioritas utama Indonesia, terutama di tengah meningkatnya aktivitas ilegal di Laut Natuna Utara. Modernisasi armada laut, peningkatan patroli perbatasan, dan pembangunan pangkalan militer di Natuna adalah beberapa langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan respons terhadap ancaman maritim.

Dari perspektif keamanan maritim, Laut Natuna Utara tidak hanya menjadi kawasan yang harus dipertahankan dari ancaman eksternal tetapi juga harus dikelola secara efektif untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai ujung tombak dalam pengawasan perairan menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga militer dan sipil dalam menjaga keamanan maritim. Susanto (2021) mencatat bahwa patroli rutin yang dilakukan Bakamla dan TNI AL telah berhasil mengurangi aktivitas *illegal fishing* di wilayah ini. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga, dan kurangnya teknologi modern masih menjadi kendala dalam pengelolaan keamanan maritim. Keamanan maritim juga memiliki dimensi regional, di mana kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN menjadi penting dalam memastikan stabilitas kawasan. Indonesia telah memainkan peran

aktif dalam mendorong disusunnya *Code of Conduct* (CoC) untuk memastikan bahwa sengketa di Laut Cina Selatan dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional (Caballero-Anthony, 2019). Dalam konteks ini, keamanan maritim menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara, baik dari perspektif domestik maupun regional.



Gambar 1.1 Matriks Keamanan Maritim menurut Christian Bueger (2015)

Dalam konteks akademik, Christian Bueger mengemukakan bahwa keamanan maritim memiliki empat dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama adalah kekuatan laut (*sea power*), yaitu kemampuan angkatan laut dalam menjaga kedaulatan dan melakukan proyeksi kekuatan di wilayah maritim. Kedua adalah keselamatan laut (*marine safety*), yang menekankan pentingnya perlindungan dari kecelakaan laut, navigasi yang aman, dan kemampuan tanggap darurat. Ketiga adalah ekonomi kelautan (*blue economy*), yakni pemanfaatan potensi ekonomi laut secara berkelanjutan demi pembangunan nasional. Keempat adalah keamanan manusia (*human security*), yang mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan sosial dan ekonomi. Pandangan Bueger ini

memperluas pemahaman keamanan maritim dari pendekatan militeristik menjadi konsep multidimensional yang mengintegrasikan aspek pertahanan, keselamatan, ekonomi, dan perlindungan sosial.

Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks Laut Natuna Utara, di mana isu-isu seperti pelanggaran ZEE, keberlanjutan sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat lokal saling berkelindan. Oleh karena itu, keamanan maritim tidak hanya dimaknai sebagai respons terhadap ancaman eksternal, tetapi juga sebagai strategi komprehensif untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan maritim strategis.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Analisis Kebijakan Luar Negeri

Analisis Kebijakan Luar Negeri merupakan kerangka analitis yang berfokus pada proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku negara dalam sistem internasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami interaksi antara berbagai aktor, institusi, dan struktur yang membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam konteks kebijakan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara, analisis ini membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti kepentingan nasional, dinamika birokrasi, dan tekanan internasional mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam menjaga kedaulatan wilayah dan stabilitas kawasan (Snyder et al., 2002; Hermann & Hermann, 1989).

1.6.1.2. Keamanan Maritim

Keamanan maritim didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi wilayah maritim dari berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional seperti pelanggaran wilayah oleh negara lain maupun ancaman non-tradisional seperti perompakan, illegal fishing, penyelundupan, dan eksploitasi sumber daya laut secara ilegal. Dalam konteks ini, keamanan maritim juga melibatkan penguatan pertahanan perbatasan, modernisasi armada laut, dan pengawasan perairan untuk mencegah aktivitas ilegal di kawasan Laut Natuna Utara. Perspektif ini mencakup tindakan domestik dan kerja sama regional untuk menjaga stabilitas kawasan (Cochrane, 2020; Susanto, 2021).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Analisis Kebijakan Luar Negeri

Analisis kebijakan luar negeri dalam penelitian ini dioperasionalkan dengan mengkaji proses pengambilan keputusan Indonesia dalam konteks kebijakan maritim di Laut Natuna Utara melalui tiga level analisis. Pada level individu, fokus diberikan pada peran pemimpin dan elit politik dalam merumuskan kebijakan strategis. Pada level negara, analisis mencakup interaksi antar lembaga seperti TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Luar Negeri dalam implementasi kebijakan. Pada level sistem, penelitian menyoroti bagaimana faktor-faktor eksternal seperti dinamika geopolitik regional dan perilaku negara-negara tetangga mempengaruhi orientasi kebijakan Indonesia. Operasionalisasi ini memungkinkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana Indonesia merumuskan dan

mengimplementasikan kebijakan maritimnya di tengah kompleksitas tantangan domestik dan internasional (Hudson, 2014; Mintz & DeRouen, 2010).

1.6.2.2. Keamanan Maritim

Keamanan maritim dioperasionalkan sebagai langkah strategis yang mencakup pengawasan wilayah, penegakan hukum di perairan, dan peningkatan kemampuan pertahanan melalui modernisasi armada laut serta patroli rutin. Penelitian ini menilai efektivitas upaya domestik dan regional dalam mencegah ancaman tradisional, seperti pelanggaran wilayah dan illegal fishing, serta mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di Laut Natuna Utara untuk memastikan kedaulatan Indonesia tetap terjaga.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa reorientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara pada era kepemimpinan Presiden Prabowo mengindikasikan transformasi fundamental dalam pendekatan strategis nasional. Transformasi ini tercermin dari pergeseran paradigma yang sebelumnya bertumpu pada pendekatan militeristik konvensional, menuju integrasi multidimensional yang mencakup penguatan kapabilitas pertahanan, intensifikasi diplomasi maritim, dan revitalisasi sosio-ekonomi kawasan. Di tengah eskalasi ketegangan yang dipicu oleh ekspansi klaim Tiongkok melalui "*Nine-Dash Line*", Indonesia mengadopsi strategi yang mengkombinasikan deterrence militer dengan pendekatan diplomatik konstruktif. Hal ini dimanifestasikan melalui modernisasi kapabilitas pertahanan maritim yang disertai dengan penguatan kerja sama regional dan pemberdayaan

komunitas pesisir sebagai elemen integral dalam arsitektur keamanan maritim nasional.

Argumen ini didukung oleh fakta bahwa kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara pada era ini tidak terlepas dari dinamika geopolitik kawasan Asia Tenggara, di mana posisi strategis Natuna menjadi simbol penting kedaulatan maritim. Melalui penguatan infrastruktur pertahanan dan patroli perbatasan, Indonesia berupaya menunjukkan kehadiran negara di wilayah yang sering menjadi sasaran pelanggaran oleh kapal-kapal asing. Di sisi lain, diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia melalui ASEAN dan mekanisme seperti *Code of Conduct* (CoC) menjadi alat penting untuk memastikan bahwa stabilitas kawasan dapat dipertahankan tanpa konfrontasi langsung.

Melalui perspektif Two Level Game Theory, reorientasi kebijakan ini mencerminkan kompleksitas tawar-menawar antara kepentingan domestik dan dinamika internasional. Pada level domestik, penguatan infrastruktur pertahanan dan program pemberdayaan masyarakat merespons tuntutan internal untuk proteksi kedaulatan teritorial. Sementara pada level internasional, pendekatan diplomasi konstruktif melalui mekanisme ASEAN dan penguatan kerja sama bilateral mencerminkan kalkulasi strategis Indonesia dalam mempertahankan stabilitas regional tanpa memicu eskalasi konflik. Interaksi dinamis antara kedua level ini membentuk karakteristik distingtif kebijakan maritim era Prabowo yang mengedepankan keseimbangan antara ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan dan kehati-hatian dalam mengelola hubungan diplomatik regional.

Melalui analisis ini, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara pada era Presiden Prabowo bukan hanya respons terhadap ancaman eksternal, tetapi juga bentuk adaptasi terhadap tantangan kompleks yang mencakup aspek geopolitik, ekonomi, dan lingkungan. Argumen ini mendasari pentingnya pendekatan multidimensional dalam menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional, serta peran strategis kebijakan maritim dalam menjaga stabilitas kawasan dan kedaulatan nasional.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi dan menganalisis reorientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara pada era kepemimpinan Presiden Prabowo. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam aspek-aspek kebijakan, dinamika geopolitik, serta tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional yang memengaruhi kawasan tersebut. Data yang digunakan bersumber dari dokumen kebijakan, laporan resmi, artikel jurnal ilmiah, serta wawancara mendalam dengan ahli di bidang hubungan internasional dan keamanan maritim.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis reorientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara pada era kepemimpinan Presiden Prabowo. Penelitian berfokus pada

pengumpulan data non-numerik, seperti dokumen kebijakan, laporan resmi, dan publikasi ilmiah, untuk memahami dinamika geopolitik dan keamanan maritim. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi pola, hubungan, dan strategi yang digunakan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan tersebut.

1.8.2. Situs Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Semarang dan Jakarta, dengan pertimbangan kedua wilayah tersebut merupakan pusat pengambilan kebijakan dan kajian strategis yang relevan. Di Semarang, penelitian akan difokuskan pada lingkungan akademis Universitas Diponegoro sebagai basis institusional, sementara di Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan lembaga-lembaga strategis seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan pusat-pusat riset pertahanan nasional menjadi lokasi yang penting untuk pengumpulan data sekunder dan wawancara dengan para ahli. Pemilihan kedua lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam terkait topik yang dibahas.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki keterlibatan langsung atau pemahaman mendalam tentang kebijakan keamanan maritim Indonesia, khususnya terkait Laut Natuna Utara. Subjek meliputi akademisi Universitas Diponegoro yang ahli dalam kajian geopolitik dan keamanan maritim, serta pejabat dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta. Selain

itu, praktisi dan analis kebijakan maritim dari institusi terkait juga menjadi subjek untuk menggali pandangan strategis mereka. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam dan perspektif komprehensif mengenai reorientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber sekunder. Data sekunder mencakup dokumen resmi, laporan kebijakan, artikel ilmiah, serta publikasi dari lembaga terkait seperti Kementerian Pertahanan dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Data ini digunakan untuk memahami secara mendalam reorientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara pada era kepemimpinan Presiden Prabowo.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan resmi, laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah, publikasi lembaga terkait, serta berita dari media terpercaya. Sumber-sumber data tersebut akan dikumpulkan dari perpustakaan, arsip institusi, basis data elektronik, dan dokumen terpublikasi yang dapat diakses secara legal dan etis. Sumber data ini dipilih untuk memastikan validitas dan relevansi informasi dalam menganalisis reorientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data utama meliputi studi dokumen dan penelusuran literatur. Pertama, studi dokumen mencakup analisis kebijakan resmi, laporan pemerintah, publikasi lembaga terkait

dan sumber tertulis lainnya untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Kedua, teknik observasi tidak langsung melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber informasi yang mencakup artikel, berita, dan publikasi terkait dinamika keamanan maritim di Laut Natuna Utara. Setiap teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip validitas, reliabilitas, dan etika penelitian ilmiah. Kombinasi metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, mendalam, dan komprehensif guna memahami reorientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami reorientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara pada era kepemimpinan Presiden Prabowo. Data yang diperoleh dari wawancara, studi dokumen, dan literatur dianalisis dengan membandingkan berbagai perspektif dan informasi yang relevan. Proses ini mencakup identifikasi pola, hubungan, serta isu-isu utama yang memengaruhi kebijakan keamanan maritim, baik dari aspek geopolitik, pertahanan, maupun keamanan. Interpretasi dilakukan dengan mengaitkan data yang dikumpulkan dengan teori dan kerangka konseptual yang digunakan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan mendalam.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan kriteria validitas dan reliabilitas yang ketat. Validitas data dicapai dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen resmi dan

literatur ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Reliabilitas dijaga dengan konsistensi dalam pengumpulan data, termasuk memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel, seperti akademisi, pejabat pemerintah, dan publikasi lembaga resmi. Selain itu, transparansi dalam proses analisis dan interpretasi data diterapkan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan menerapkan kriteria ini, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid dan reliabel. Pendekatan komprehensif ini bertujuan menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan akademis.